

Peta Jalan Baru Pengembangan Ekonomi Warga NU

Imam Aziz
Ketua PBNU
email: terautara@gmail.com



Nahdlatul Ulama mempunyai tiga pilar yang menjadi fondasi bagi tidak saja keberadaan organisasi itu sendiri melainkan menjadi ruh bagi perkembangan Indonesia. Pilar pertama *Nahdlatul Wathan*, yakni kebangkitan kesadaran berbangsa, yang menjadi embrio dari konsep dan praktik negara-bangsa (*nation-state*) modern yang ketergambar dalam konstitusi negara Republik Indonesia saat ini. Kedua, *Tashwirul Afkar* sebagai pilar kesadaran kaum cendekiawan, dan ketiga, *Nahdlatut-Tujjar* yang secara harfiah berarti kebangkitan para pedagang. Ketiga-tiganya kemudian

menubuh ke dalam sebuah gerakan yang bernama Nahdlatul Ulama.

Kelahiran kesadaran kaum ulama tersebut tentu tidak berada dalam ruang kosong. Dalam konteks sosial ekonomi, dua pilar yakni *Nahdlatul Wathan* dan *Nahdlatut-Tujjar* menjadi sebuah momentum penting dalam perjalanan kebangsaan kita. Tak banyak disadari, bahwa keterkaitan keduanya sangat erat. *Nahdlatul Wathan* membuka kesadaran tentang sebuah konsep kebangsaan baru yang berbeda dari perjalanan kebangsaan Islam Nusantara sebelumnya. Sebelum era kolonial, konsep kebangsaan berupa sistem kesultanan Islam yang

secara territorial tesekat-sekat pada kawasan tertentu, dari Aceh di barat hingga Ternate di timur. Sistem politik kesultanan yang kokoh itu kemudian luluh setelah dikuasai secara langsung atau tidak langsung oleh politik-ekonomi kolonial.

Di awal abad 20, kesadaran nasionalisme telah menciptakan “impian baru”. Nasionalisme bangkit untuk merambah jalan baru yang tidak lagi disekat-sekat oleh paham regional (seperti yang dibangun oleh kerajaan Islam), tetapi telah melampaui itu semua. Keindonesiaan yang diimpikan oleh semua gerakan nasionalisme ketika itu menjadi konsep yang menaungi seluruh segmen politik regional, rasial, maupun keagamaan.

Yang menarik, bahwa hanya ada sedikit gerakan nasionalisme dengan kesadaran keindonesiaan baru yang mempunyai “mimpi” pembangunan ekonomi. Dua di antaranya adalah *Sarekat Dagang Islam* (SDI) yang dibentuk H. Samanhudi dan pedagang batik di Solo Jawa Tengah (1905), dan *Nahdlatut-Tujjar* yang didirikan pada tahun 1918 oleh KH Hasyim Asy’ari, KH Wahab Chasbullah, KH Bisri Syansuri dll yang tumbuh dan berkembang di Surabaya dan sekitarnya. Secara kebetulan keduanya menggunakan kata “dagang”, yang dapat diduga bahwa pemikiran di balik itu merupakan “mimpi” akan sebuah sistem “ekonomi pasar”. Memang fenomena ini mengundang tanda tanya. Mengapa kata “dagang” yang dipakai oleh kedua gerakan Islam tersebut. Di

saat itu, saya kira, fenomena “dagang” sebagai sebuah aktivitas ekonomi pasar modern, belum sepenuhnya menjadi kegiatan ekonomi warga pribumi. Mayoritas warga pribumi, termasuk kalangan santri, masih menjalankan ekonomi berbasis pertanian tradisional.

Apakah cukup masuk akal jika kaum ulama mendeklarasikan *Nahdlatut Tujjar*—kebangkitan kaum pedagang-- di masa awal abad 20, sementara faktanya kaum pribumi masih berada pada dunia pertanian. Mengapa bukan *Nahdlatul Fallah* – kebangkitan kaum tani? Tentu ini memerlukan penelitian lebih lanjut untuk menjelaskan aspek sosio-historis *Nahdlatut Tujjar*. Tetapi, kita yakin para pencetus *Nahdlatut Tujjar* bukan tidak memahami realitas warga pribumi saat itu, tetapi mereka juga menyadari bahwa masa depan ekonomi pada akhirnya adalah berlakunya sistem “ekonomi pasar”.

Adalah Karl Polanyi yang “menubuatkan” kelahiran negara-bangsa (*nation-state*) dan ekonomi pasar dalam “*The Great Transformation*”, buku yang pertama kali dirilis pada tahun 1944. Belajar dari perkembangan ekonomi Inggris, dia mengambil sebuah kesimpulan, “ekonomi pasar modern” dan “*nation-state modern*” adalah sebuah penemuan baru umat manusia yang dia sebut sebagai “masyarakat pasar” (*market society*). Polanyi berpendapat, bahwa perkembangan negara modern bergandengan tangan dengan perkembangan ekonomi pasar

modern.¹

Yang esensial dari perubahan ekonomi pra-modern ke ekonomi pasar adalah perubahan mentalitas ekonomi manusia. Sebelum “transformasi besar”, pasar hanya punya peran terbatas di dalam masyarakat. “Transformasi besar” dimulai dengan munculnya negara modern yang kuat, yang diperlukan untuk mendorong perubahan dalam struktur sosial dan sifat manusia yang memperbolehkan praktik ekonomi kompetitif. Perubahan ini meruntuhkan tatanan sosial dasar yang ada dalam sepanjang sejarah. Perubahan terpenting adalah bahwa faktor produksi seperti tanah dan tenaga kerja bisa dijual di pasar dengan harga yang ditentukan, tidak lagi “dialokasikan” seperti dalam ekonomi tradisional yang selama ini berlaku. Jadi, perubahan besar itu terletak pada perubahan institusi manusia dan sekaligus sifat manusia.

Komitmen Negara

Negara bangsa baru bernama Indonesia, oleh para pendirinya dirancang untuk menjadi tumbuh dan berkembangnya ekonomi kerakyatan, antara lain memimpikan sebuah sistem ekonomi berasas kekeluargaan, dan Koperasi menjadi “soko guru”-nya (Pasal 33 UUD 1945). Derivasi terpenting dari konstitusi adalah diundangkannya UU No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Program

reformasi agraria menjadi titik awal bagi reformasi ekonomi, diikuti dengan penyediaan infrastruktur permodalan pada sektor-sektor pertanian strategis. Bank Tani pernah digagas oleh Presiden Sukarno, melalui UU Darurat RI Nomor 18 Tahun 1957 Tentang Bank Tani dan Nelayan Bank tersebut secara spesifik dimaksudkan untuk membantu petani, buruh tani dan nelayan untuk meningkatkan produksi usaha pertanian, perikanan dan peternakan hingga menyempurnakan pengolahan dan penjualan hasil hasilnya. Negara mempunyai komitmen yang kuat untuk mendorong dan memfasilitasi tumbuhnya ekonomi berbasis pertanian yang kuat, yang mampu bermain di pasar nasional maupun internasional.

Sayangnya, peta jalan sistem perekonomian itu buyar di tengah jalan. Selanjutnya konstitusi tak mampu berbicara banyak, artinya negara kehilangan kendalinya sebagai fasilitator, dan anehnya negara justru menjadi pemain langsung, seperti dalam pengelolaan BUMN pertanian atau perkebunan. Sementara lahan-lahan yang masih perawan diserahkan kepada korporasi-korporasi besar yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan rakyat di sekitarnya. Di kedua tempat itu rakyat bahkan sering kali menjadi musuh utamanya. Ini merupakan kegagalan pertama dan utama dalam tata kelola agraria oleh karena kegagalan memahami cita-cita para pendiri bangsa ini. Apa yang dibayangkan Polanyi mengenai perubahan mentalitas seiring dengan

1 Karl Polanyi, *The Great Transformation: the political and economic origins of our time* (Boston: Beacon Press, 2001) hal. 59

kelahiran negara bangsa, tidak terjadi.

Kegagalan di dalam reforma agraria dan pengembangan sistem ekonomi kerakyatan itu mengakibatkan peminggiran petani, dan berkembangnya subsistensi dalam sektor ini. Petani masih berproduksi, tetapi hampir tidak mengalami pertumbuhan. Pada era 1970-an kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih pada angka 45 persen, tetapi pada tahun 2013 kontribusi sektor pertanian tinggal 15.41 persen. Ini karena, pertama, penguasaan lahan yang semakin hari semakin merosot. Kedua, karena ketiadaan teknologi yang membuat petani sangat bergantung pada musim dan iklim. Ketiga, ketiadaan dukungan institusi yang memungkinkan petani terlindungi dari resiko kerugian akibat kegagalan panen. Akibat dari itu semua petani kita tetap hidup dalam sistem ekonomi tradisional, dia memproduksi dan sekaligus menjadi konsumennya. Program negara untuk pertanian selama ini tidak mengubah apa pun di tingkat petani. Maka tak heran, konversi lahan pertanian produktif ke penggunaan lain non pertanian menjadi tak terkendali dan masif. Derasnya konversi lahan pertanian sangat terkait dengan kondisi ekonomi petani yang sulit. Tekanan biaya hidup dan rendahnya nilai tukar pertanian yang sangat rendah, menjadikan usaha tani semakin sulit berkembang, sehingga pertanian tidak menjadi tumpuan hidup, dan regenerasi petani semakin sulit diharapkan.

BPS mencatat sekitar 35.09 persen

(atau 38.88 juta orang) dari 110.80 juta penduduk Indonesia yang bekerja pada periode Agustus 2012 menggantungkan hidupnya di sektor pertanian, baik sebagai petani, maupun buruh tani. Angka ini sebetulnya hanya ingin menutupi fakta bahwa sektor pertanian adalah lumbung pengangguran (baca: pengangguran tertutup). Jika angka itu ditambah dengan angka pengangguran terbuka pada periode Agustus 2013 yang mencapai 6.25 persen maka angka penduduk miskin di Indonesia jauh lebih tinggi dari yang "diakui" oleh BPS yang hanya sebesar 28.55 juta orang per September 2013 (Berita Resmi Statistik BPS No, 06/01/Th. XXVII, 2 Januari 2014)

Merintis Peta Jalan Baru

Kegagalan mengembangkan sektor pertanian ini terbukti sangat merugikan berjuta-juta penduduk Indonesia yang termiskinkan secara struktural. Karena itu, saat inilah pentingnya kita menata kembali seluruh *roadmap* sistem ekonomi sesuai Konstitusi kita. Pertama-tama perlu mengubah mindset kita mengenai sektor pertanian yang selama ini dianggap tidak memiliki kontribusi pada pertumbuhan ekonomi, dan dianggap sebagai sektor "tradisional" yang tidak mempunyai nilai tambah yang berarti. Tetapi faktanya, kebutuhan pokok mayoritas penduduk Indonesia masih bergantung pada produk-produk pertanian. Hanya saja, pasar komoditas pertanian sifatnya *monopsoni* atau *oligopsoni* yang dikuasai oleh pedagang-



pedagang (perantara) besar, sehingga terjadi eksploitasi harga yang sangat merugikan petani.

Kedua, membuat desain kelembagaan yang menggambarkan roadmap pengembangan sektor pertanian, mulai dari sistem produksi dan distribusi sehingga dapat mengintegrasikan ekonomi *periferal* itu ke dalam sistem pasar nasional dan internasional. Sistem koperasi sebetulnya dapat digunakan untuk mendorong petani yang punya lahan sempit dapat berproduksi secara bersama-sama, dengan mengembangkan komoditas pertanian sesuai dengan potensi daerah tertentu. Bersamaan dengan itu, dibangun juga koperasi-koperasi yang dengan fasilitas permodalan dan sentuhan teknologi sederhana mampu mengolah hasil pertanian menjadi industri olahan

setengah jadi atau produk makanan jadi yang siap dipasarkan sesuai permintaan pasar nasional maupun internasional. Dengan demikian, nilai tambah yang diperoleh dari proses itu langsung dapat dinikmati oleh petani.

Ketiga, kebijakan subsidi diarahkan paralel dengan peta pertumbuhan ekonomi pertanian. Sebagai contoh, di suatu daerah yang ditetapkan sebagai basis pertanian yang memproduksi jagung, maka subsidi diberikan kepada petani yang menanam jagung, hingga pengolahan jagung menjadi produk setengah jadi misal untuk makanan ternak atau untuk produk unggulan lain.

Roadmap semacam ini sangat diperlukan untuk merevitalisasi ekonomi pertanian yang hampir tenggelam. Dan kita perlu mengingatkan, bahwa negara tidak perlu lagi bermain

sendiri mengelola BUMN pertanian/perkebunan, karena dengan roadmap itu pemerintah bisa menyerahkan hak pengelolaan perkebunan itu kepada petani, sehingga lebih efisien. Jika dilihat angka kepemilikan petani atas lahan yang semakin sempit atau bahkan banyak petani yang tidak memiliki lahan, maka tata kelola agrarian menjadi agenda yang sangat mendesak untuk dilaksanakan.

Posisi NU

Tak terelakkan, bahwa peran Nahdlatul Ulama sangat strategis dalam upaya menata ulang sistem perekonomian kerakyatan yang sangat nyata mempengaruhi kehidupan warganya. Dapat dipastikan, mayoritas petani adalah warga NU. Ketika negara tidak melakukan sesuatu yang nyata untuk mengembangkan sistem

ekonomi pertanian tersebut, NU dapat membuat *pilot project* sederhana yang dipandu dan difasilitasi oleh lembaga-lembaga perekonomian, baik pada tingkat konseptual maupun pada tingkat fasilitasi pada eksperimen-eksperimen pelembagaannya. Menurut data di Lembaga Perekonomian NU, saat ini terdapat 5.000 lembaga keuangan baik berbentuk bank (BPR) maupun lembaga keuangan non-bank yang dimiliki NU. Potensi aset ini sudah cukup kuat untuk mengembangkan strategi pertumbuhan ekonomi pertanian sebagaimana yang saya contohkan di atas.

Ketika Undang-undang Desa diterapkan, konon dengan kucuran uang yang cukup fantastis di desa, maka nasibnya akan sia-sia jika tidak dibarengi dengan *roadmap* ekonomi pertanian secara nasional. []